

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2016-2022

Dani Permana¹, Suherman², Anita³, Seprimayani Telaumbanua⁴, Yuliana⁵, Erika Simanjuntak⁶
Universitas Palangka Raya

Correspondence		
Email: uje.due.telu123@gmail.com , suherman@feb.upr.ac.id , nitttaa453@gmail.com , Telaumbanuaateris@gmail.com , yulianaana0331@gmail.com , rika27092002@gmail.com .		No. Telp:
Submitted 2 Maret 2024	Accepted 4 Maret 2024	Published 9 Maret 2024

ABSTRAK

Indonesia telah melaksanakan system desentralisasi dengan memberikan Sebagian wewenang kepada otonomi daerah. Otonomi daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) selama periode 2016-2022 telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola potensi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Provinsi Kalimantan timur mendapat wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya. Tujuan penelitian ini ialah kinerja pemerintah dalam keuangan daerah provinsi Kalimantan timur berdasar kinerja keuangan. Penelitian ini berfokus dengan menganalisis rasio perhitungan seperti Derajat Ekonomi Fiskal, Pertumbuhan pendapatan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan rasi keserasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggunakan rumus rasio perhitungan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini ialah derajat ekonomi fiskal Kalimantan timur berkembang positif meningkat terus-menerus dan berpengaruh signifikan selama 7 tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah kaltim mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2017, positif di 2018-2019, negatif di 2020-2021 dan positif 2022. Rasio kemandirian kaltim yang tinggi dan cukup mencolok selama 7 tahun (2016-2017). Rasio efektivitas Kalimantan timur tidak efektif pada tahun 2016, 2017, 2020, dan efektif pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022. Rasio efisiensi kaltim selama 7 tahun efisien, dan rasio keserasian keuangan daerah Kalimantan timur selama 7 tahun (2016-2017) mengalami keserasian.

Kata kunci : Keuangan Daerah Kalimantan Timur

Pendahuluan

Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan beberapa wewenang kepada pemerintahan otonomi, yang berarti mereka memiliki pemerintah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah sama, yang berarti pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan dan keuangan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian direvisi menjadi undang-undang 23 Tahun 2014, memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan keanekaragaman serta potensi dan keistimewaan masing-masing daerah.

Memahami pendapatan tambahan membantu stakeholder menilai kesehatan keuangan dan prospek perusahaan secara menyeluruh. Otonomi daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) selama periode 2016-2022 telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan, Kaltim dapat mengutamakan keadilan dan perimbangan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan daerah menjadi fokus, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Kemandirian keuangan daerah meningkat melalui alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kaltim harus membangun struktur anggaran yang memperhitungkan

potensi penerimaan, fokus belanja daerah, dan pengelolaan keuangan secara efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam belanja daerah menjadi perhatian, termasuk belanja pegawai dan belanja modal. Keserasian antara kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi focus.

Dalam periode 2016-2022, Kalimantan timur mengelola keuangan daerah, berikut adalah beberapa aspek keuangan daerah Kalimantan timur selama 7 tahun yang menjadi fokus penelitian ini :

AKUN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Pagu	Realisasi	pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	realisasi	pagu	Realisasi	pagu	realisasi	pagu	realisasi
Pendapatan Daerah	36.96 8,11	29.02 4,82	27.09 7,11	26.14 0,58	28.66 7,49	32.93 4,35	35.75 9,19	40.06 6,90	38.95 4,19	34.54 5,08	30.67 1,531	32.96 9,57	33.39 7,58	50.10 0,19
PAD	7.115 ,72	6.548 ,62	6.366 ,05	7.048 ,34	6.701 ,25	8.138 ,18	7.938 ,45	9.537 ,63	9.519 ,56	7.910 ,85	8.102, 19	9.451 ,12	9.577 ,84	12.31 7,55
TKDD *)	26.00 2,15	20.01 6,63	18.05 7,01	15.72 2,79	18.73 7,13	21.09 0,60	23.41 7,86	24.87 9,38	24.25 5,47	22.64 9,22	19.96 7,40	18.90 4,98	21.08 8,52	32.97 3,76
Pendapatan Lainnya	3.850 ,24	2.459 ,56	2.674 ,05	3.369 ,44	3.229 ,11	3.705 ,56	4.402 ,88	5.649 ,89	5.179 ,17	3.985 ,00	19.96 7,40	18.90 4,98	2.731 ,21	4.808 ,88
Belanja Daerah	41.27 2,24	28.18 4,68	28.78 5,91	26.42 2,78	30.52 1,56	30.82 5,74	36.59 6,89	37.47 5,53	40.36 9,58	33.97 0,87	34.49 0,43	34.20 7,41	35.93 8,82	39.59 6,43
Belanja Modal	13.49 4,21	7.054 ,85	6.784 ,88	5.342 ,67	7.596 ,38	7.535 ,20	9.032 ,75	9.344 ,15	8.838 ,58	7.625 ,09	6.380, 51	7.428 ,35	6.117 ,73	8.642 ,97

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam keuangan daerah provinsi Kalimantan timur berdasar kinerja keuangan. Penelitian ini berfokus dengan menganalisis rasio perhitungan seperti Derajat Ekonomi Fiskal, Pertumbuhan pendapatan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Eisiensi, dan rasi keserasian Keuangan daerah provinsi Kalimantan timur.

LANDASAN TEORI ANGGARAN REALISASI

Sebelum memuat neraca laporan dan laporan arus kas, laporan tentang anggaran yang terealisasi merupakan salah satu laporan kas daerah menunjukkan perbedaan atau bandingan antar anggaran pagu atau anggarn rencana dengan anggaran yang telah dilakukan pada suatu periode, untuk mencapai informasi yang akuaran mengenai dana yang dilaksanakan dan lapoaran anggaran. Perbandingan lapoaran dapat dilihat dari suatu periode. (Rahayu, 2016)

ANGGARAN PADU

Anggaran padu adalah anggaran untuk kepentingan suatu daerah dari pendapatan asli dari suatu daerah, anggaran padu ialah anggaran yang sudah terlaksana atau terealisasi dan itu dilakukan untuk Pembangunan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah, anggaran padu biasanya melakukan belanja untuk belanja rutin dan belanja pembangunan untuk kegiatan dan proyek Pembangunan. (Daling, 2013)

PAD

PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan merupakan contoh penerapan konsep desentralisasi. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber, seperti kekayaan negara tersendiri, pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan PAD lain yang diperbolehkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah bagian kekayaan negara yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pajak dan retribusi daerah terdiri dari beberapa macam pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Sumber penerimaan tambahan yang diperbolehkan bagi PAD terdiri dari pendapatan daerah yang tidak dikenakan pajak atau retribusi daerah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan pendapatan luar negeri. (Nasir, 2019)

TKDD

TKDD merupakan singkatan dari Transfer Daerah ke Dana Desa. Ialah salah satu bagian dari anggaran yang telah dialokasikan untuk provinsi, kabupaten dan desa. TKDD merupakan bagian Transfer Ke Daerah (TKD) dan dana desa. TKD sendiri terbagi menjadi dana umum yang dialokasikan yang biasanya disebut DAU, DBH, dan DAK. TKDD dikelola oleh kementerian keuangan daerah dan dialokasikan berdasarkan formula yang mempertimbangkan factor-faktor seperti populasi, Tingkat kemiskinan, dan kapasitas fiskal, pemerintah menekankan transparansi dan akuntabilitas dan penggunaan dana tkdd.

PENDAPATAN LAINYA

Pendapatan tambahan merupakan sumber pendapatan penting bagi perusahaan, selain dari aktivitas inti yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari sewa aset, penjualan aset tetap, keuntungan investasi, dan bunga adalah beberapa jenisnya. Pendapatan lainnya dapat berkontribusi besar terhadap laba bersih, bahkan menjadi sumber utama jika ada masalah dengan operasional inti. Menurut klasifikasi, pendapatan dapat dibagi menjadi dua kategori: pendapatan non-operasi (yang tidak berasal dari aktivitas utama) dan pendapatan lain-lain (yang berasal dari sewa aset). Sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengungkapkan jenis pendapatan, jumlah, dan kategori lainnya. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan memahami kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya pendapatan utama. Singkatnya, pemahaman yang baik tentang pendapatan tambahan memungkinkan stakeholder untuk menilai secara menyeluruh kesehatan keuangan dan prospek perusahaan.

PAJAK DAERAH

Pajak daerah adalah Sumbangan sah yang diperlukan yang harus diberikan oleh individu atau perusahaan kepada daerah tanpa menerima pembayaran dalam bentuk apa pun disebut pajak daerah. Pajak daerah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan berbagai peran, antara lain fungsi akhir reguler dan fungsi anggaran. Pemungutan pajak daerah mempunyai tujuan fiskal dengan mendatangkan uang dari masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah. Tujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah dan meminimalkan biaya pemungutan merupakan indikasi dari peran ini. Fungsi regularend berfungsi sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan lokal tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah mungkin berdampak pada seberapa banyak suatu komoditas atau jasa tertentu digunakan. (Asih, 2018)

BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan Kewajiban pemerintah daerah, belanja daerah dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih periode tahun anggaran yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk menyusun rencana belanja daerah setiap tahunnya. Baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah terlibat dalam aktivitas belanja ini. Belanja daerah dapat dilakukan dalam tiga bentuk: modal (untuk membeli atau memperluas aset tetap), lainnya (untuk membayar bunga utang dan subsidi), dan operasional (untuk belanja staf, komoditas dan jasa, serta hibah, dan lain-lain). Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengelola kepentingan komunitasnya sendiri dan urusan pemerintahan, pemerintah federal menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah melalui belanja daerah semacam ini. (Wage & Effendi, 2023)

BELANJA MODAL

Belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan menciptakan modal, seperti ketika membangun, memperoleh, atau membeli aset tetap fisik atau menimbun barang yang akan bernilai selama lebih dari satu periode akuntansi. (1 tahun). Hal ini memerlukan peningkatan biaya rutin seperti biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau memperpanjang masa manfaat aset selain meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Beberapa contoh belanja modal adalah: pembelian atau perolehan tanah; investasi pada mesin dan peralatan produksi; membangun atau memperoleh struktur; membangun infrastruktur; investasi pada jalan, irigasi, dan jaringan; dan belanja modal fisik lainnya, seperti pembelian atau perolehan bangunan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam keuangan daerah provinsi Kalimantan timur berdasar kinerja keuangan.

a. Derajat Ekonomi fiskal

$$\text{Rumus} = \text{PAD} / \text{TPD} \times 100\%$$

Pernyataan : PAD= Pendapatan Asli Daerah

TPD= Total Pendapatan Daerah

b. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pt} - \text{Po}}{\text{Po}} \times 100\%$$

Pernyataan : Pt= Pendapatan Tahun Akhir

Po= Pendapatan Tahun Sebelum

c. Rasio Kemandirian

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{TKDD} + \text{Pendatan lainnya}} \times 100\%$$

Pernyataan : PAD= Pendapatan Asli Daerah

TKDD= Transfer ke Daerah dan Dana desa

d. Rasio Efektivitas

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Anggaran Realisasi PAD}}{\text{Anggaran Pagu PAD}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Belanja Anggaran}}{\text{Pendapatan Anggaran}} \times 100\%$$

f. Rasio Keserasian

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN**Derajat Ekonomi Fiskal Provinsi Kalimantan Timur**

Tahun	PAD	TPD	Rasio Hasil
2016	7.115,72	36.968,11	19,24%
2017	6.366,05	27.097,11	23,51%
2018	6.701,25	28.667,49	23,37%
2019	7.938,45	35.759,19	22,19%
2020	9.519,56	38.954,19	24,43%
2021	8.102,19	30.671,53	26,41%
2022	9.577,84	33.397,58	28,67%

Berdasarkan tabel diatas Derajat ekonomi fiskal keuangan daerah Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2022. Pada tahun 2016, penerimaan pajak daerah sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) berada pada angka 19,24%. Tahun berikutnya, pada 2017, terjadi lonjakan signifikan menjadi 23,51%, menunjukkan peningkatan yang cepat dalam kontribusi penerimaan pajak terhadap ekonomi daerah. Meskipun mengalami fluktuasi minor di tahun 2018 (23,37%) dan 2019 (22,19%), kecenderungan kenaikan tersebut terus terjadi dengan peningkatan pada tahun 2020 menjadi 24,43%, kemudian 26,41% pada 2021, dan mencapai titik tertinggi pada 2022 sebesar 28,67%. Kenaikan ini mungkin mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, potensi pertumbuhan ekonomi di daerah, atau penyesuaian kebijakan pajak. Walaupun meningkatnya derajat ekonomi fiskal menunjukkan potensi kemajuan fiskal, perlu diingat bahwa penggunaan pajak yang bijaksana sangat penting agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Pt	P0	Rasio Hasil
2016	29.024,82		
2017	26.140,58	29.024,82	-9,93%
2018	32.934,35	26.140,58	25,98%
2019	40.066,90	32.934,35	21,65%
2020	34.545,08	40.066,90	-13,78%
2021	32.969,57	34.545,08	-4,56%
2022	35.784,17	32.969,57	8,53%

Berdasarkan tabel diatas Pertumbuhan pendapatan daerah di Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, tercatat penurunan yang cukup drastis sebesar -9,93%, menandakan adanya penurunan pendapatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, situasi berubah pada tahun 2018 dengan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 25,98%, mengindikasikan pulihnya pendapatan daerah secara substansial. Meskipun demikian, pertumbuhan menurun sedikit pada tahun 2019 sebesar 21,65%. Tahun 2020 kembali menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar -13,78%, mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global atau faktor-faktor lokal yang mempengaruhi penerimaan daerah. Meskipun demikian, pada 2021, meskipun masih

negatif (-4,56%), terjadi sedikit perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, tercatat pertumbuhan sebesar 8,53%, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berkelanjutan. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal, kondisi ekonomi global dan lokal, serta perubahan dalam struktur pendapatan daerah. Dalam menghadapi fluktuasi ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan keberlanjutan pendapatan, diversifikasi sumber pendapatan, dan kebijakan yang tepat guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Kalimantan Timur

Rasio Kemandirian Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	PAD	TKDD	Pendapatan lainya	Hasil	Kriteria
2016	29.024,82	20.016,63	2.459,56	246,10%	Tinggi
2017	26.140,58	15.722,79	3.309,44	304,11%	Tinggi
2018	32.934,35	21.090,60	3.705,56	370,71%	Tinggi
2019	40.066,90	24.879,38	5.649,89	565,15%	Tinggi
2020	34.545,08	22.649,22	3.985,00	398,65%	Tinggi
2021	32.969,57	18.904,98	4.613,46	392,74%	Tinggi
2022	35.784,17	27.251,52	3.925,67	392,69%	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas Rasio Kemandirian Keuangan daerah Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang cukup mencolok dari tahun 2016 hingga 2022. Pada tahun 2016, rasio ini tercatat sangat tinggi sebesar 246,10%, menunjukkan kemampuan besar daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya. Namun, angka tersebut terus meningkat secara dramatis hingga tahun 2019 mencapai 565,15%, menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang jauh lebih tinggi. Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 398,65%, kemudian stabil pada kisaran angka 392,74% hingga 392,69% dari 2021 hingga 2022. Kemandirian keuangan yang tinggi ini bisa menjadi hasil dari diversifikasi pendapatan daerah, kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kuat, atau kebijakan fiskal yang berhasil dalam meningkatkan pendapatan lokal. Meskipun tingkat kemandirian yang tinggi pada dasarnya menggambarkan potensi finansial yang kuat, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan agar dapat mendukung pembangunan dan keberlanjutan ekonomi daerah secara seimbang.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Repad	Kriteria
2016	29.024,82	36.968,11	78,51%	Tidak Efektif
2017	26.140,58	27.097,11	96,46%	Tidak Efektif
2018	32.934,35	28.667,49	114,88%	Efektif
2019	40.066,90	37.759,19	106,11%	Efektif
2020	34.545,08	38.954,19	96,60%	Tidak Efektif
2021	32.969,57	30.679,53	107,46%	Efektif
2022	35.784,17	33.397,58	107,14%	Efektif

Berdasarkan tabel diatas Rasio Efektivitas Keuangan daerah Kalimantan Timur menggambarkan tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran pada rentang waktu 2016 hingga 2022. Pada tahun 2016 dan 2017, rasio tersebut menunjukkan ketidak efektifan dengan angka 78,51% dan 96,46% berturut-turut, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran kurang efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, pada tahun 2018, terjadi perbaikan yang signifikan dengan rasio mencapai 114,88%, menunjukkan peningkatan dalam efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 106,11%, namun angka ini masih mengindikasikan tingkat efektivitas yang baik. Tahun 2020 kembali menunjukkan ketidakefektifan dengan angka 96,60%, namun perbaikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dengan rasio berturut-turut sebesar 107,46% dan 107,14%, menunjukkan efisiensi yang ditingkatkan dalam penggunaan anggaran daerah. Meskipun telah terjadi perbaikan dari tahun ke tahun, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran guna memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Kalimantan Timur.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Belanja Anggaran	Pendapatan Anggaran	Hasil	Rasio perhitungan
2016	41.272,24	36.968,11	111,64%	Efisien
2017	28.785,91	27.097,11	106,23%	Efisien
2018	30.521,56	28.667,47	106,46%	Efisien
2019	36.596,89	35.759,19	102,34%	Efisien
2020	40.363,58	38.954,19	103,61%	Efisien
2021	34.490,43	30.671,53	112,45%	Efisien
2022	35.938,82	33.397,58	107,60%	Efisien

Berdasar data diatas Rasio Efisiensi Keuangan daerah Kalimantan Timur menggambarkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya. Dari tahun 2016 hingga 2022, terdapat variasi kinerja efisiensi yang dapat dilihat dari persentase efisiensi keuangan. Pada tahun 2016, efisiensi mencapai 111,64%, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut berada di atas target yang ditetapkan. Tren menurun sedikit terjadi pada tahun 2017 dengan efisiensi mencapai 106,23%, namun berhasil pulih pada tahun 2018 dengan rasio 106,46%. Kemudian, terdapat penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2019 dengan efisiensi turun menjadi 102,34%. Namun, di tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan kinerja yang menggembirakan: 103,61% pada tahun 2020, 112,45% pada tahun 2021, dan 107,60% pada tahun 2022. Peningkatan yang terlihat dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mungkin melibatkan strategi efisiensi pengeluaran, peningkatan pendapatan, atau optimalisasi alokasi anggaran. Meskipun terdapat variasi dari tahun ke tahun, tren umum menunjukkan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan efisiensi keuangan di Kalimantan Timur.

Rasio Keserasian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Total belanja Operasi	total Belanja Daerah	Hasil	Rasio Perhitungan
2016	21.129,83	28.184,68	74,96%	Serasi
2017	21.080,73	26.422,78	79,78%	Serasi
2018	23.290,54	30.825,74	75,55%	Serasi
2019	28.131,38	37.475,53	75,06%	Serasi
2020	26.493,36	33.970,87	77,98%	Serasi
2021	26.779,06	34.207,41	78,98%	Serasi
2022	28.937,84	36.294,29	79,73%	Serasi

Berdasar data diatas Rasio Keserasian Keuangan Daerah Kalimantan Timur mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tahun 2016 hingga 2022, terdapat variasi dalam tingkat keserasian keuangan tersebut. Pada tahun 2016, rasio keserasian mencapai 74,96%, menandakan adanya keseimbangan yang kuat antara penerimaan dan pengeluaran. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 79,78%, namun kembali turun pada tahun 2018 dengan angka 75,55%. Tingkat keserasian tetap relatif stabil pada tahun 2019 (75,06%) dan tahun 2020 (77,98%). Tren positif terlihat pada tahun 2021 dengan rasio keserasian mencapai 78,98%, yang kemudian naik sedikit menjadi 79,73% pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, yang mungkin melibatkan strategi peningkatan pendapatan, kontrol pengeluaran, atau optimalisasi alokasi anggaran. Meskipun ada variasi tahunan, upaya untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah Kalimantan Timur terlihat dari peningkatan ini, yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Analisis derajat ekonomi fiskal, pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2016-2022 memberikan gambaran mendalam tentang kesehatan ekonomi dan keuangan daerah tersebut. Pertama, derajat ekonomi fiskal mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada sumber daya eksternal. Kemudian, pertumbuhan pendapatan memberikan indikasi tentang dinamika ekonomi daerah dalam menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar daerah bergantung pada pendapatan lokalnya sendiri, yang penting untuk mengevaluasi tingkat kemandirian ekonomi daerah. Rasio efektivitas dan efisiensi mencerminkan seberapa baik kebijakan dan program yang diimplementasikan mencapai tujuan yang ditetapkan dan seberapa efisien sumber daya yang digunakan dalam proses tersebut. Sementara itu, rasio keserasian keuangan daerah menilai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Hasil analisis selama periode 2016-2022 akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan pemahaman ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk perbandingan dengan daerah-daerah lain atau sebagai bahan evaluasi

untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa depan. Dengan demikian, analisis ini memiliki implikasi yang penting dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 177–191.
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade ekonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Rahayu, R. P. (2016). Analisa Ebit-Eps Terhadap Struktur Modal Optimal Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 175–189.
- Wage, S., & Effendi, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 405–412.